

TINJAUAN TEORITIS PENGEMBANGAN *HALAL TOURISM* DI SEKTOR PARIWISATA INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN *BELT ROAD INITIATIVE* TIONGGOK

¹Ahmad Hanif Fajerin, ²Luthfi Fatihatul Hidayah

¹IAIN Tulungagung, ²SMP Al Kamal Blitar
Jerrinahmad@gmail.com, luthfi.fatiha@gmail.com

Abstrak

Populasi Muslim sebesar 80% menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (*halal lifestyle*). Mengingat perkembangan jumlah wisatawan muslim menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ini merupakan modal awal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor pariwisata. Apalagi dengan menyepakatinya Indonesia bergabung dengan China dalam proyek *Belt Road Initiative* (BRI) diharapkan memberikan dampak baik bagi pengembangan *halal tourism* di daerah Indonesia seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali yang akan dilalui oleh proyek ini. Dengan menggunakan metode eksploratis berdasarkan studi literatur, penelitian akan membahas dan menjawab persoalan yang berkaitan dengan pengembangan *halal tourism* di sektor pariwisata Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Belt Road Initiative* Tiongkok. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, Pelaksanaan kebijakan jalur *Belt Road Initiative* yang secara *maqoshid syariahnya* diyakini akan menciptakan *masalah* yang besar untuk masyarakat. Yang kedua, dengan ketentuan pelaksanaan pariwisata halal harus mengacu pada standar syariah yaitu standar yuridis yang diwujudkan dalam fatwa DSN MUI no 108 tahun 2016, dan standar etik yang diterapkan oleh setiap pelaku pariwisata syariah yang dikembangkan di empat daerah yang masuk jalur BRI. Yang ketiga, kesiapan wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali dalam pengembangan pariwisata halal secara umum dapat dikatakan sudah siap. Hal ini dapat didasarkan dari kesiapan aspek ekonomi dan demografi. Dengan adanya pengembangan wisata halal di jalur *Belt Road Initiative* diharapkan akan menarik investor yang memberikan dana investasinya untuk pengembangan pariwisata halal sesuai dengan master plan ekonomi syariah 2019-2024.

Kata Kunci: *Halal Tourism*, Sektor Pariwisata Indonesia, *Belt Road Initiative*.

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam cukup melimpah dibandingkan dengan Negara tetangganya, yang mana Indonesia mempunyai lautan yang lebih luas dari pada daratan, hal ini tentunya mempunyai sebuah potensi besar yang apabila didayagunakan dengan benar dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pendaayagunaannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi destinasi wisata. Daerah-daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang eksotis diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan. salah

satunya adalah kegiatan ekonomi berupa wisata.¹

Salah satu wacana yang berkembang di sektor pariwisata Indonesia adalah wisata halal. Pengertian dari wisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Sharia Tourism*, *Islamic tourism*.² Selain itu wisata halal juga bisa dimaknai sebagai industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada aturan

¹ Iwan Setiawan. 2015. *Potensi Destinasi Wisata di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers. Semarang : Unisbank.

² Faisal., dkk. 2018. *Model Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal (Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung)*, Lampung : LP2M UIN Raden Intan.

Islam. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah, misalnya penyajian makanan dari bahan-bahan yang halal atau aturan perwisataan yang mengikuti tata cara dalam syari'at Islam.³

Pertumbuhan jumlah wisatawan Muslim diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia hingga tahun 2030. Dengan jumlah wisatawan Muslim mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp.40triliun, dengan, asumsi pertumbuhan pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18 persen.⁴ Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki lebih dari 80% populasi Muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta mega biodiversity dan lebih dari 800.000 masjid, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (*halal lifestyle*). Ini merupakan modal awal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor pariwisata.

. Maka dari itu adanya wisata halal tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikembangkan, apalagi dengan adanya proyek jalur sutra yang disebut sebagai *One Belt One Road* (OBOR) atau yang kemudian dengan

dinamika International yang terjadi dengan adanya proyek ini pada akhirnya disebut dengan *Belt Road Initiative* (BRI). Sesaat setelah presiden Xi Jinping diangkat menjadi Presiden mengumumkan pada dua pidato berbeda pada saat kunjungan luar negerinya yaitu tentang *Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road*. *One Belt* mengacu pada *Silk Economic Road* atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa yang juga akan didukung dengan jalur rel, jalan raya, dan jaringan pipa baru. Sedangkan, *One Road* mengacu pada *21st Century Maritime Silk Road* atau sebuah jalur sutra berbasis laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Dengan adanya dua proyek tersebut, poin utamanya dengan adanya inisiasi melalui *Belt Road Initiative* bertujuan untuk pembangunan konektivitas lintas benua melalui jalur darat dan laut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa *Belt Road Initiative* (BRI) merupakan kesempatan bagi berbagai negara untuk mendapatkan keuntungan timbal-balik melalui pendanaan bersama pembangunan fasilitas infrastruktur yang melintas di berbagai kawasan, termasuk timbal balik bisnis dan ekonomi dalam kawasan pariwisata Indonesia yang berstandar syariah dalam proyek *maritime silk road*.

Maritim Silk road yang menghubungkan berbagai negara melalui jalur laut bisa dimungkinkan sejalan dengan visi Indonesia yang ingin mengembangkan poros maritim Indonesia yang disebut dengan *Global Maritime Fulcrum*. Asia Timur saat ini sedang dalam proses menjadi Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia, terutama jika dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok. Sehingga dengan adanya proyek ini, Indonesia akan menghadapi sebuah tantangan sekaligus potensi besar dalam pengembangan jalur

³ Salehudin dan Luthfi. 2010. *Marketing Impact of Halal Labeling toward Indonesian Muslim Consumer's Behavioral Intention Based on Ajzen's Planned Behavior*. Proceeding of 5th International Conference on Business and Management 30 Research (ICBMR), Presented 4th August 2010, Depok-Indonesia.

⁴ <https://knks.go.id/berita/197/sembilan-strategi-jadikan-indonesia-destinasi-wisata-halal-kelas-dunia?category=1>. Diakses 23/04/2020 pukul 20.13 WIB

maritim. Rencana jalur proyek *Belt Road Initiative* (BRI) akan melewati empat wilayah utama Indonesia yaitu Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Pihak dari China dan badan usaha di Indonesia sudah meneken memorandum of understanding (MoU). Dimana dalam MoU tersebut ada kesepakatan proyek di Sumatera Utara sebanyak ada tiga proyek, Kalimantan Utara tiga proyek, Bali dua proyek, dan Sulawesi Utara satu proyek.⁵

Dengan menyepakatinya Indonesia bergabung dengan China dalam proyek *Belt Road Initiative* (BRI) maka investasi proyek untuk infrastruktur kedepan akan berkembang pesat dengan harapan akan memberikan dampak baik bagi pengembangan *halal tourism* di Indonesia sepanjang jalur yang akan dilalui oleh proyek ini. Sehingga pada akhirnya diperlukan kajian untuk melihat Kesiapan Sektor Pariwisata Melalui *Halal Tourism* Dalam Kebijakan *Belt Road Initiative* Tiongkok dengan Indonesia melalui beberapa pertanyaan yang akan dikaji. Pertanyaan antara lain yang pertama adakah standar syariah untuk wisata halal yang sudah siap diterapkan, yang kedua adalah kesiapan empat wilayah yang terlewati proyek *Belt Road Initiative* (BRI) untuk pengembangan *halal tourism* dilihat dari aspek ekonomi dan demografi di wilayah yang akan dijadikan destinasi wisata halal, dan pertanyaan ketiga adalah tinjauan syariah adanya jalur *Belt Road Initiative* (BRI) di wilayah Indonesia.

METODE

Tulisan ini dilakukan berdasarkan metode eksploratif berdasarkan studi literatur, dengan cara mencari dan mengkaji teori atau rujukan yang relevan sesuai dengan harapannya secara konseptual melihat persoalan yang sedang dikaji untuk dibahas secara keilmuan yang menjadi

dasar penelitian.⁶ Dengan menggunakan metode studi literatur ini peneliti mulai dengan mengamati serta mengkaji bahan pustaka yang dijadikan sebagai acuan untuk membahas dan menjawab serta memberikan solusi terkait persoalan yang berkaitan dengan kesiapan sektor pariwisata melalui *halal tourism* dalam kebijakan *Belt Road Initiative* baik dari segi tinjauan syariah dengan adanya jalur *Belt Road Initiative*, kesiapan dalam penerapan standart syariah di sektor pariwisata, dan kesiapan empat wilayah yang terlewati *Belt Road Initiative*.

PEMBAHASAN

TINJAUAN SYARIAH BELT ROAD INITIATIVE

Kehalalan proyek *Belt Road Initiative* (BRI) dilihat dari tinjauan syariah maka tujuan paling utama adalah karena adanya manfaat yang ditimbulkan dari proyek ini. Sesuai dengan *maqoshid syariah*, maka proyek ini mempunyai masalah yang indikatornya adalah *kulliyat al khoms* yaitu mampu menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Proyek *Belt Road Initiative* (BRI) jika dianalisis berdasarkan indikator tersebut maka akan terlihat manfaatnya.

Berdasarkan indikator pertama yaitu mampu menjaga Agama, yang mana dengan adanya pariwisata halal yang dikembangkan sudah secara jelas menegaskan bahwa adanya jalur *Belt Road Initiative* (BRI) di empat wilayah di Indonesia mengarahkan layanan dan fasilitas yang ramah Muslim, melalui penyediaan tempat ibadah yang tidak jauh dari destinasi, penyediaan kamar mandi dengan air bersih, pelayanan dan fasilitas untuk menunjang Bulan Ramadan, penyediaan Tour dan paket wisata yang tidak berbenturan dengan waktu ibadah, dan penyediaan hotel Syariah. Selain itu mewujudkan kegiatan perdagangan minuman dan makanan dengan mempertimbangkan aspek

⁵ CNN Indonesia. 2019. China Lirik Sembilan Proyek Infrastruktur RI dalam KTT OBOR. Diakses tanggal 25/04/2020 pukul 08:16 WIB

⁶ V. Wiratna Sujarwen. 2014. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers)

syariah.⁷ Maka disinilah agama itu benar – benar terjaga.

Kedua yaitu menjaga akal dan jiwa. Sebagai penganut faham kerjasama internasional bebas aktif maka kepentingan nasional merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dalam wacana politik internasional, konsep kepentingan nasional umumnya digunakan dalam menjelaskan perilaku negara atau kebijakan luar negeri yang diambil. Kepentingan nasional merupakan kondisi yang mengharuskan para pemegang kebijakan petunjuk rasional dalam menjalankan tugasnya.⁸ Jika dilihat dari proyek *Belt Road Initiative* (BRI) ini bahwa sikap pemerintah Indonesia yang secara masuk akal bekerjasama dalam proyek BRI ini adalah bentuk ketidak tundukan pemerintah Indonesia terhadap dominasi Amerika dalam menentukan kegiatan ekonomi. Indonesia masih mempunyai sisi kemandirian dan kedaulatan dalam menentukan sikap ekonominya dengan cara kebebasan bekerja sama dengan siapapun demi kepentingan rakyat demi keuntungan rakyat untuk kesejahteraan bersama. Situasi inilah yang kemudian masuk kategori mampu menjaga akal dan jiwa, mampu menjaga rasionalitas dalam menentukan arah kesejahteraan rakyat. Yang harapannya adalah ketika semua berjalan lancar, pariwisata halal berjalan dengan baik maka akan berdampak pada jiwa rakyat yang semakin tenang dan mudah untuk bersyukur.

Indikator selanjutnya mengenai kemampuan menjaga harta dan keturunan. Maksud dari menjaga harta ini adalah bagaimana kemudian ekonomi bisa berjalan dengan baik, PDB meningkat, pendapatan meningkat dengan cara pengembangan wisata halal. Selama tahun 2019, jumlah kunjungan

wisman ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan, dengan tingkat pertumbuhan Pasar Pariwisata Halal yang pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan Muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% (*rate of growth forecast*) sejak tahun 2014. Selain itu, pada 2019 Indonesia bersama Malaysia menempati posisi teratas negara dengan destinasi wisata halal terbaik. Besarnya potensi jumlah wisatawan muslim global, menjadikan wisata halal menjadi salah satu sektor pendorong industri halal Indonesia.⁹ Dengan adanya proyek *Belt Road Initiative* (BRI) ini tentu terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara secara umum dan meningkatkan pendapatan daerah secara khusus, yang pada akhirnya perekonomian akan surplus dan dapat meminimalisir hutang kepada negara lain. Dan ketika itu terjadi maka pemerintah sudah meminimalisir pembayaran hutang dengan bunga yang bagi sebagian masyarakat muslim itu termasuk riba yang harus dihindari. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban semua pihak untuk menjamin bahwa anak cucu penerus bangsa akan diwarisi dengan kondisi ekonomi yang sejahtera dan kondisi ekonomi yang tidak menghilangkan kesyariahannya. Oleh karena itu dengan adanya pariwisata halal di jalur BRI ini secara jelas akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi penerus bangsa berupa ekonomi yang halal, ekonomi yang tidak jauh dari Al Qur'an dan Hadist.

Sehingga secara umum, adanya proyek *Belt Road Initiative* (BRI) yang melewati sebagian wilayah Indonesia tidak melanggar syariat, dan menciptakan potensi ekonomi syariah yang besar melalui pariwisata halal di Indonesia.

⁷ Hendry Ferdiansyah, dkk. 2020. *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism*. Journal of Sustainable Tourism Research. Vol.2, No.1, Januari 2020, 30-34.

⁸ Syaiful Anam, Ristiyani. 2018. Kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Vol.12, No.2

⁹ Indeks Perjalanan Muslim Global (GMTI – Global Muslim Travel Index), 2019

Selain itu dilihat dari kemaslahatan dalam menganalisis proyek BRI maka dapat ditarik penjelasan bahwa proyek ini tidak melanggar hukum syara' dan mampu menciptakan banyak kemaslahatan meskipun pasti ada *mudhorot* yang secara teknis dapat dihadapi dan dihindari. Berdasarkan tinjauan syariah ini maka pendapat dari penulis adalah BRI sudah sesuai dengan *maqoshid syariah* karena mampu memberikan dampak masalah bagi banyak manusia melalui kerjasama perdagangan antar negara.

KESIAPAN HALAL TOURISM

Hukum pariwisata dalam pelaksanaannya bisa dikategorikan halal, haram makruh ataupun mubah. Indikasi dari setiap hukum ini adalah kemaslahatan dan kemudhorotan. Suatu pariwisata dikatakan halal ketika pelaku ekonominya meniatkan kegiatan wisatanya untuk dakwah, dan untuk menyiarkan nilai – nilai kebiakan serta mampu lebih bersyukur kepada Allah. kedua, wisata yang mubah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan. Sedangkan yang ketiga adalah wisata yang makruh dilakukan karena tidak mempunyai tujuan syar'i seperti melancong ke negara-negara yang di dalamnya terdapat banyak kerusakan. ketiga, wisata yang haram dilakukan dengan alasan karena untuk maksiat, berpartisipasi terhadap perilaku orang kafir, biayanya menyebabkan tertundanya membayar hutang, melanggar perintah kedua orang tua, dan lain sebagainya.¹⁰ Selain itu, ada juga standar etik dan standar yuridis yang harus dilakukan oleh setiap pelaku pariwisata halal.

Standar etik yang ditekankan adalah perilaku setiap penikmat wisata halal ini, hal ini ditekankan karena wisata halal harus dilakukan dengan menjalankan prinsip kesyariahan yang benar dan baik. Jadi secara umum semua standar

baik standar syar'i, standar yuridis dan standar etik merupakan satu kesatuan yang terkumpul dalam standar syariah pariwisata halal. Standar ini menunjukkan bahwa adanya istilah syariah dalam setiap yang dilakukan akan ada konsekwensi terhadap segala aktivitas yang dilakukan, tanpa kecuali aktivitas pariwisata, yakni harus mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan sebagaimana yang tersirat dan tersurat di dalam sumber ajarannya, yakni al-Qur'an dan Sunnah.¹¹ Artinya, ketika pariwisata halal ini dilakukan dengan sebenar – benarnya maka dampaknya akan sangat besar yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya, ketika wisata halal ini dilaksanakan hanya sekedarnya saja, atau hanya branding semata, maka dampaknya juga akan sangat buruk baik bagi agama maupun kemanusiaan dan juga ekonomi.

Pariwisata halal yang berpotensi dikembangkan dijalar *Belt Road Initiative* (BRI) tentu harus mempertimbangkan standar syariah pariwisata halal. Standar syariah yang bisa dijadikan pedoman adalah minimal fatwa dewan syariah nasional (DSN) majelis ulama Indonesia (MUI) mengenai kesyariahan suatu perkara. Hal ini dikarenakan, dalam hukum formal Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang standar wisata halal. Pelaksanaan pariwisata halal akan mendapatkan perhatian lebih besar jika telah mendapatkan mandat dari pemerintah pusat. Namun, kondisinya belum demikian. Belum terdapat induk hukum tertinggi yang mengatur pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia.¹²

Meskipun ketiadaan aturan legal mengenai pariwisata halal, tetapi wacana ini sudah masuk masterplan ekonomi syariah Indonesia tahun 2019 – 2024, apalagi pada periode ini wakil presiden Indonesia merupakan sosok yang pernah mencetuskan wisata halal melalui MUI,

¹⁰ Muhammad Ja'far. 2017. Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di IndonesiaHal 44

¹¹ Ibid. Hal 177

¹² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Masterplan ekonomi syariah tahun 2019 – 2024.

beliau adalah KH. Ma'ruf Amin yang pernah menjabat sebagai ketua MUI. Fatwa DSN MUI mengenai pariwisata halal tertuang secara jelas pada fatwa nomor 108 tahun 2016 yang intinya adalah menjelaskan mengenai syarat, prasyarat dan teknis dalam melaksanakan pariwisata halal, khususnya yang akan dikembangkan di jalur *Belt Road Initiative* (BRI).

Jalur yang akan dilewati oleh berbagai macam orang yang berasal dari berbagai macam negara, dan berbagai macam keyakinan agama tentu menjadi sebuah tantangan yang menarik. Sehingga standar syariah yang sudah difatwakan oleh MUI akan mencoba diterapkan di wilayah – wilayah pada jalur BRI. Standar syariah yang difatwakan oleh MUI menjelaskan mengenai beberapa hal misalkan mengenai wisata, hotel dan makanan semuanya harus berstandar syariah. standar yang ditentukan oleh prinsip syariah menurut fatwa DSN MUI yaitu Penyelenggaraan wisata yang pertama wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/Israf, dan kemunkaran, dan yang kedua adalah menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.¹³ Sehingga dengan adanya prinsip ini maka pelaksanaan *halal tourism* ada status hukum syariat yang berlaku, misalkan halal atau haram atau hukum lainnya.

Diperlukan terobosan baru dalam proses perumusan dan pengesahan undang-undang pariwisata halal demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat pariwisata halal terbaik di dunia, seperti penerbitan peraturan daerah terkait pariwisata halal. Namun tentunya peraturan daerah tersebut harus berdasarkan standar syariah yang disusun sesuai dengan prinsip maqoshid syariahnya dan mempunyai tujuan yang maslahah. Suatu kegiatan ekonomi, tak terkecuali pariwisata syariah dikatakan maslahah ketika mampu memenuhi ketentuan yang disebut dengan *kulliyat al khoms* atau

dalam istilah lain disebut dengan menjaga lima hal. Lima hal tersebut adalah ketika pelaku ekonomi mampu menjaga lima hal (*kulliyat al Khoms*) yaitu kegiatan ekonomi yang dapat menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan.¹⁴ Sehingga ketika lima hal ini dijaga secara etika dan secara hukum Islam pasti akan memberikan masalah kepada orang banyak. Jadi ketika harus ada aturan formal yuridis dan standar mengenai pariwisata halal, indikatornya harus masalah dan kemaslahatan dapat diukur dengan lima hal yang juga bisa dijadikan standar syariah pariwisata halal di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan jalur BRI yang melewati Indonesia, tentu selain mempertimbangkan aspek kesyariaannya juga harus melihat kesiapan wilayah yang dilewati dalam bidang ekonomi dan demografinya.

KESIAPAN WILAYAH JALUR BELT ROAD INITIATIVE

Daerah di wilayah Indonesia yang dilewati jalur *Belt Road Initiative* (BRI) terdapat empat wilayah yaitu bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara dalam menghadapi jalur BRI sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal diempat wilayah tersebut tentu harus melihat kesiapannya dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek demografi. Untuk aspek ekonomi, dalam mengembangkan pariwisata halal harus mempersiapkan dari aspek infrastruktur, APBD dan memahami perilaku ekonomi di empat wilayah tersebut. Jika dilihat dari masterplan ekonomi syariah di tahun 2019 – 2024 maka keempat daerah tersebut sebenarnya tidak masuk rencana pemerintah, karena keempat daerah tersebut tidak masuk kategori delapan provinsi yang disebutkan dalam rilis masterplan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya proyek ekonomi jalur BRI ini, keempat wilayah

¹³ Fatwa DSN-MUI no 108 Tahun 2016

¹⁴ Ika Yunia fauziyah, Abdul qodir riyadi. Prinsip dasar ekonomi Islam. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) Hal 69

tersebut harus berkembang dan mandiri, khususnya dalam meningkatkan kepariwisataan halal disana sebagai produk unggulan yang akan disosialisasikan dan dipasarkan kepada semua negara yang melewati jalur BRI ini. Sehingga, dengan tidak masuknya keempat daerah tersebut proyek pengembangan akan sangat tergantung pada pendanaan daerah dan investasi negara – negara yang tergabung dalam jalur ekonomi BRI, seperti Tiongkok yang sudah berkeinginan untuk berinvestasi berupa infrastruktur di empat wilayah tersebut.

Kesiapan empat wilayah tersebut jika dilihat dari potensi ekonominya sebenarnya sangat besar. Namun, yang dijadikan catatan dalam potensi ekonomi adalah adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi di bali, sumatera utara, kalimantan utara dan sulawesi utara terbilang cukup kecil dibandingkan dengan daerah yang sudah masuk masterplan ekonomi syariah yang dirancang oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Ekonomi Bali tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 %, bahkan melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan angka 6,33 %, perlambatan juga dialami Sulawesi Utara yang pada tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan 5,66% melambat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 6,01%, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tumbuh 5,22 % dan kalimantan utara sebesar 6,91%.¹⁵ Semakin tinggi persentase pertumbuhan PDB berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi (konsumsi dan produksi) masyarakat disuatu daerah.

Perbandingan persentase pertumbuhan diempat daerah yang sudah disebutkan sebelumnya meskipun lebih rendah dengan daerah lain tetapi fakta dari data tersebut menunjukkan selisih angka yang tidak jauh.

¹⁵BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/30/25e3ca3836c003ffcaa1bacc/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-pengeluaran--2015-2019.html> . Diakses tanggal 24/04/2020 pukul 23.36 WIB

Artinya pertumbuhan ekonomi empat daerah tersebut masih sangat berpotensi untuk terus meningkat dengan adanya jalur perekonomian BRI dengan cara pengembangan pariwisata halal. Masih ada optimisme yang tinggi diempat wilayah ini untuk mengembangkan perekonomiannya melalui wisata halal, tinggal bagaimana melihat peran pemerintah daerah dalam mengupayakan proyek pariwisata halal dijalur BRI bisa maksimal, yang dalam konteks ini adalah ketersediaan dana pemerintah yang dirancang dalam APBD masing - masing daerah.

Anggaran dana di bali, sumatera utara, sulawesi utara dan kalimantan utara tentu tidak sebesar provinsi DKI jakarta atau Jawa timur. Untuk APBD diprovinsi bali menunjukkan anggaran sebesar Rp. 6,634 Triliyun dimana 7,4 milyar rupiah digunakan untuk pariwisata di bali¹⁶, untuk daerah sumatera utara pendapatan daerahnya sebesar Rp 15.271.676.789.618 triliyun.¹⁷ Untuk kalimantan utara pendapatan daerahnya hanya sebesar Rp 2,5 Triliyun rupiah,¹⁸ dan yang terakhir adalah sulawesi utara sebesar Rp. 4,09 Triliyun¹⁹. Berdasarkan paparan anggaran APBN di empat daerah yang ada di jalur BRI tentu nominalnya sangat sedikit ketika ingin membangun wisata halal dijalur BRI. Namun, dalam sisi positifnya dengan adanya jalur BRI ini diharapkan dengan adanya proyek wisata halal akan lebih banyak Investor yang mau berinvestasi di wilayah tersebut. Sehingga dari data anggaran APBD dari keempat provinsi tersebut masih belum cukup dan belum siap

¹⁶ Ni putu Eka Niratmini.

<https://bali.bisnis.com/read/20190101/538/874419/apbd-bali-pada-2019-rp6834-triliun-ini-prioritas-penggunaannya>. Diakses tanggal 28/04/2020 pukul 00.00

¹⁷ Riva. <http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/3155-apbd-sumut-2019-disahkan-gubernur-edy-ingatkan-opd-jangan-korupsi>. Diakses tanggal 25/04/2020 pukul 00.05

¹⁸ Humas Kaltara.

<https://humas.kaltaraprov.go.id/pengumuman/view/4334/apbd-kaltara-tahun-2019.html> . 25/04/2020 pukul 00.11

¹⁹ Ryo. <https://manado.tribunnews.com/2018/11/19/apbd-2019-rp-409-triliun-gubernur-olly-dondokambey-berpantun-di-sidang-paripurna?page=1>. Diakses tanggal 25/04/2020 pukul 00.16

untuk membangun pariwisata halal di jalur BRI sehingga dalam prakteknya harus menerima investasi.

Efek dari pengembangan pariwisata halal ini adalah dengan semakin tingginya intensitas kegiatan ekonomi masyarakat di empat daerah. Karena *belt road initiative* ini salah satunya adalah pengembangan jalur perdagangan melalui jalur laut maka pariwisata yang paling sesuai adalah pariwisata di sektor kelautan. Sehingga kemungkinan – kemungkinan barang dan jasa yang bisa diperdagangkan adalah panorama alam pantai dan kuliner halal khas daerah serta hotel untuk beristirahat. Dengan adanya efek ekonomi ini tentu akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di empat daerah tersebut dengan catatan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pariwisata halal. Sebagai perbandingan pelaksanaan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat dilihat dari indeks persepsi dan sikap diketahui bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat baik masyarakat umum maupun masyarakat penggiat pariwisata memiliki visi yang sejalan dengan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah provinsi NTB. Ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi dan sikap sejalan, dalam artian bahwa masyarakat NTB menganggap rencana tersebut BAIK dan bersikap POSITIF terhadap rencana tersebut. Selain itu di NTB juga memiliki masyarakat yang ingin mempercepat dilaksanakannya wisata halal di daerahnya. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat NTB akan dampak positif dari model pariwisata tersebut.²⁰ Sehingga pelaksanaan wisata halal yang akan dikembangkan di empat wilayah yang masuk jalur BRI selain kesiapan faktor

ekonomi, juga harus melihat kesiapan faktor demografi.

Kesiapan demografi dalam pengembangan wisata halan di bali, sumatera utara, sulawesi utara dan kalimantan utara secara umum tidak akan berdampak berlebihan pada pelaksanaan wisata halal. Apalagi ketika wisata halal ini akan dilewati oleh beberapa negara yang mempunyai latar belakang menganut agama Islam, selain itu bagi yang bukan muslim akan tertarik dengan bagaimana pelaksanaan Islam di Nusantara yang representasinya dilihat dari empat daerah tersebut. Namun, yang menjadi tantangan adalah ketika melihat aspek demografi dimasing – masing provinsi yang tidak semua mayoritas beragama Islam. Berdasarkan jumlah penduduk di provinsi bali di tahun 2010 menunjukkan data sebanyak 3.890.757 jiwa,²¹ sedangkan di provinsi sumatera utara sebanyak 14.102.911 jiwa,²² dan untuk sulawesi utara sebanyak 2.461.028 jiwa,²³ dan yang terakhir adalah kalimantan utara sebanyak 691.058 jiwa.²⁴ Berdasarkan data demografi inilah kemudian potensi pariwisata halal akan terlaksana atau tidak. Hal ini dikarenakan pariwisata halal tentu sangat identik dengan penganut agama Islam yang kebetulan dari keempat daerah jalur BRI mayoritas muslim, kecuali provinsi bali. Sehingga dapat ditarik sebuah pendapat bahwa untuk faktor demografi pada saat pelaksanaan proyek pariwisata halal tidak ada permasalahan yang serius. Namun yang perlu diwaspadai adalah perilaku – perilaku ekstrimis baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal keyakinan.

Perilaku ekstrimis dalam ekonomi adalah ketika melakukan kegiatan ekonomi dengan menghalalkan segala cara. Misalkan menjual objek dagang yang diragukan kehalalannya baik dari aspek zatnya atau cara mendapatkan barangnya. Ini yang kemudian tidak termasuk

²⁰ Lalu Adi Permadi, Sri Darwini, Weni Retnowati, Iwan Kusuma Negara Emilia Septian. 2018. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di provinsi nusa tenggara barat. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018.

²¹ BPS provinsi Bali

²² BPS Provinsi Sumatera utara

²³ BPS provinsi Sumatera utara

²⁴ BPS Provinsi Kalimantan Utara

kategori wisata halal, meskipun pasti akan ada tantangan mengenai hal ini yang dikarenakan adanya jalur perdagangan BRI ini tidak memfasilitasi umat Islam saja, melainkan semua manusia didunia yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Tantangan yang kedua adalah ekstrimis keagamaan yang memang dengan sengaja ingin membinasakan manusia yang berbeda dengan keyakinannya. Dan ketika hal ini terjadi maka citra Islam akan semakin buruk yang kemudian dampaknya adalah ketidakpercayaan dan ketidak tertarikan terhadap pariwisata halal yang akan dikembangkan pada proyek BRI pada empat wilayah di Indonesia. Sebagai penguat untuk mewujudkan pariwisata halal dalam proyek *One Belt One Road* atau *Belt Road Initiative* maka harus ditegaskan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan standar syariah dengan tujuan menciptakan lingkungan wisata yang ramah bagi orang muslim khususnya.

PENUTUP

Simpulan

Proyek jalur BRI ditinjau dari aspek syariahnya maka sudah baik. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan jalur BRI yang secara *maqoshod syariahnya* diyakini akan menciptakan masalah yang besar untuk masyarakat. Masalah dari proyek jalur ini indikasinya adalah pelaksanaan jalur perdagangan ini tidak menghilangkan lima hal yang harus dijaga, yang diantaranya adalah menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Sehingga berdasarkan kondisi inilah proyek ini bisa dikatakan sudah sesuai prinsip syariah, apalagi ketika Indonesia merespon proyek BRI ini dengan mengembangkan pariwisata halal.

Pelaksanaan pariwisata halal yang akan diterapkan di jalur *Belt Road Initiative* (BRI) secara umum dapat dinyatakan tidak melanggar hukum syariat. Dengan ketentuan pelaksanaan pariwisata halal harus mengacu pada standar syariah yang ditentukan. Standar syariah yang

dimaksud disini adalah standar mengenai kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah, kepatuhan terhadap stadandar yuridis yang diwujudkan dalam fatwa DSN MUI no 108 tahun 2016 disaat belum adanya hukum formal Indonesia yang mengatur tentang wisata halal di Indonesia, dan standar etik yang diterapkan oleh setiap pelaku pariwisata syariah yang dikembangkan di empat daerah yang masuk jalur BRI.

Kesiapan empat wilayah dalam pengembangan pariwisata halal secara umum dapat dikatakan sudah siap. Hal ini dapat didasarkan dari kesiapan aspek ekonomi dan demografi. Kesiapan ekonomi disini adalah kesiapan mengenai anggaran yang tersedia untuk pengembangan pariwisata halal. Memang dana yang dimiliki sangat terbatas, namun dengan adanya proyek *Belt Road Initiative* (BRI) maka diharapkan ada investor yang memberikan dana investasinya untuk pengembangan pariwisata halal, dan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB maka sangat layak jika bali, sumatera utara, kalimantan utara, sulawesi utara mengupayakan pariwisata halal karena pertumbuhan PDB nya dikisaran 5 – 6 %. Selain itu kesiapan pariwisata halal di jalur BRI juga dilihat dari kesiapan demografi yang secara umum sudah memadai. Namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam menjalankan wisata halal di daerah yang minim beragama muslim. Selain itu, diperlukan sikap pro aktif baik dari pusat maupun daerah untuk membuat regulasi mengenai *halal tourism* dalam menyiapkan proyek jalur BRI yang sesuai dengan master plan ekonomi syariah 2019-2024.

DAFTAR PUSTAKA

Awalia, Hafidzah. 2017. Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. Volume 1 Ed 1, March 2017.

- BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/30/25e3ca3836c003ffcaa1bacc/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-pengeluaran--2015-2019.html> . Diakses tanggal 24/04/2020 pukul 23.36 WIB
- CNN Indonesia. 2019. China Lirik Sembilan Proyek Infrastruktur RI dalam KTT OBOR. Diakses tanggal 25/04/2020 pukul 08:16 WIB
- Faisal., dkk. 2018. Model Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal (Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung), Lampung : LP2M UIN Raden Intan.
- Fatwa DSN-MUI no 108 Tahun 2016.
- Fauziah, Ika Yunia, Abdul qodir riyadi. 2014. Prinsip dasar ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ferdiansyah, Hendry, dkk. 2020. Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Journal of Sustainable Tourism Research*. Vol.2, No.1, Januari 2020, 30-34.
- Humas Kaltara. <https://humas.kaltaraprov.go.id/pengumuman/view/4334/apbd-kaltara-tahun-2019.html>. Diakses tanggal 25/04/2020 pukul 00.11 WIB.
- Crescent Rating. 2019. *Global Muslim Travel Index 2019*.
- Ja'far, Muhammad. 2017. Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2018. Masterplan ekonomi syariah tahun 2019 – 2024.
- KNKS. <https://knks.go.id/berita/197/sembilan-strategi-jadikan-indonesia-destinasi-wisata-halal-kelas-dunia?category=1>. Diakses 23/04/2020 pukul 20.13 WIB
- Niratmini, Ni putu Eka. <https://bali.bisnis.com/read/20190101/538/874419/apbd-bali-pada-2019-rp6834-triliun-ini-prioritas-penggunaannya>. Diakses tanggal 28/04/2020 pukul 00.00
- Permadi, Lalu Adi, Sri Darwini, Weni Retnowati, Iwan Kusuma Negara Emilia Septian. 2018. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di provinsi nusa tenggara barat. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018.
- Riva. <http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/3155-apbd-sumut-2019disahkan-gubernur-edy-ingatkan-opd-jangan-korupsi>. Diakses tanggal 25/04/2020 pukul 00.05.
- Ryo. <https://manado.tribunnews.com/2018/11/19/apbd-2019-rp-409-triliu-gubernur-olly-dondokambey-berpantun-di-sidang-paripurna?page=1>. Diakses tanggal 25/04/2020 pukul 00.16
- Salehudin dan Luthfi. 2010. Salehudin dan Luthfi. (2010). Marketing Impact of Halal Labeling toward Indonesian Muslim Consumer's Behavioral Intention Based on Ajzen's Planned Behavior. *Proceeding of 5th International Conference on Business and Management 30 Research (ICBMR)*, Presented 4th August 2010, Depok-Indonesia.
- Setiawan, Iwan. 2015. Potensi Destinasi Wisata di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers*. Semarang : Unisbank.

- Sujarwen, V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers)
- Syaiful Anam, Ristiyani. 2018. Kebijakan Belt Road Initiative (BRI) Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Vol.12, No.2.